

IMPLEMENTASI SISTEM INFORMASI INVENTARIS OBAT DAN ALAT KONTRASEPSI BERBASIS WEB (Studi Kasus : Badan Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Keluarga Berencana)

¹Dwi Putri Ratnasari, ²Sri Herawati

^{1,2}Fakultas Teknik, Universitas Trunojoyo Madura

Jl. Raya Telang Po. Box. 2 Kamal, Bangkalan

E-mail : ¹putrisevenjune07@gmail.com, ²sriherawati@trunojoyo.ac.id

ABSTRAK

Program Keluarga Berencana (KB) di Indonesia telah mampu memperoleh hasil yang memuaskan. Kesadaran masyarakat akan pentingnya Norma Keluarga Kecil yang bahagia dan Sejahtera (NKKBS) dari tahun ke tahun semakin meningkat. Namun, krisis ekonomi pada tahun 1997 telah mempengaruhi pelaksanaan program KB di tanah air. Banyak masyarakat tidak mampu membiayai pelayanan KB, membiayai ongkos transportasi ke klinik, dan atau membayar harga alat dan obat kontrasepsi (alkon). Pemerintah kesulitan menyelenggarakan pelayanan KB atau menyediakan alkon bersubsidi atau gratis, sehingga banyak pasangan usia subur (PUS) yang *drop out*. Pelayanan KB merupakan salah satu pelayanan kesehatan dasar, sehingga kementerian Kesehatan menetapkan KB sebagai salah satu program kesehatan wajib yang harus disukseskan. Pelayanan kontrasepsi masuk dalam daftar standar pelayanan minimal (SPM) yang harus dilaksanakan dan menjadi tanggung jawab seluruh jajaran kesehatan di Indonesia. Kementerian Kesehatan mengembangkan model sistem informasi KB kesehatan yang telah disosialisasikan sejak tahun 2007. Penelitian ini bertujuan mengimplementasikan sistem informasi inventaris KB kesehatan yang dapat membantu dalam pengolahan data obat dan alat kontrasepsi.

Kata kunci: Sistem Informasi, Keluarga Berencana, alat kontrasepsi.

ABSTRACT

Family Planning Program (KB) in Indonesia has been able to obtain satisfactory results. Public awareness of the importance of the happy and prosperous Small Family Norm (NKKBS) is increasing from year to year. However, the economic crisis in 1997 has affected the implementation of family planning programs in the country. Many communities can not afford to pay for family planning services, finance transportation costs to clinics, and or pay for the price of contraceptives and drugs (alkon). The government has difficulties in providing family planning services or providing subsidized or free alkon, so many couples of childbearing age (PUS) drop out. Family planning is one of the basic health services, so the Ministry of Health establishes KB as one of the mandatory health programs that must be succeeded. Contraception services are included in the list of minimum service standards (SPM) that must be dilaksanakan and be the responsibility of all health personnel in Indonesia. Ministry of Health developed a model of KB health information system that has been socialized since 2007. This study aims to implement information systems KB health inventory that can assist in data processing of drugs and contraceptives.

Keywords: Information Systems, Family Planning, contraceptives.

PENDAHULUAN

Ilmu Manajemen Informatika merupakan ilmu yang mempelajari tentang informasi pengolahan data yang penerapannya mengacu pada kemajuan teknologi informasi. Perkembangan informasi cukup pesat dipicu dengan kebutuhan data dan informasi yang cepat dan akurat. Data dan informasi banyak digunakan dalam perusahaan, lembaga maupun sebuah instansi.

Pengolahan data dan informasi menggunakan teknologi web. Teknologi web adalah sebuah teknologi interaktif sebagai sarana informasi secara global, sehingga dapat diakses oleh masyarakat umum atau pihak tertentu yang memiliki akses. Teknologi web dikembangkan sesuai dengan kemajuan teknologi informasi. Teknologi ini digunakan oleh perusahaan atau instansi yang membutuhkan informasi mudah diakses dimanapun dan kapanpun. Hal ini menjadikan salah satu sarana yang dapat meningkatkan perkembangan teknologi. Selain kemudahan akses web juga dapat mempercepat proses penambahruan informasi, peningkatan produktifitas, dan efisiensi suatu perusahaan atau instansi yang menerapkan teknologi web. Teknologi ini juga dapat diterapkan secara *offline* untuk kepentingan internal perusahaan atau instansi tersebut.

Teknologi web diterapkan juga untuk instansi Badan Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Keluarga Berencana. Salah satunya dengan pengolahan data program KB. Program KB di Indonesia telah mampu mencapai hasil yang memuaskan Kesadaran masyarakat akan pentingnya Norma Keluarga Kecil yang Bahagia dan Sejahtera (NKKBS) dari tahun ke tahun tampanya semakin meningkat. Namun, krisis ekonomi pada tahun 1997 telah mempengaruhi pelaksanaan program KB di tanah air. Banyak masyarakat tidak mampu membiayai pelayanan KB, membiayai ongkos transportasi ke klinik, dan atau membayar alat kontrasepsi (alkon). Pemerintah sangat kesulitan

dalam menyelenggarakan pelayanan KB dan menyediakan alat kontrasepsi bersubsidi atau gratis, sehingga banyak pasangan usia subur (PUS) yang *drop out*.

Tahun 2002, implementasi kebijakan desentralisasi mengakibatkan kegiatan koordinasi yang sebelumnya menjadi kewenangan BKKBN mulai terhambat, seperti : pengadaan alat dan obat kontrasepsi (alkon), kegiatan komunikasi informasi dan edukasi (KIE), program pendidikan dan pelatihan tenaga pelaksanaan KB (diklat), serta sistem informasi KB. Hal tersebut terjadi karena prioritas dan kebijakan diberbagai daerah. Pelayanan KB merupakan salah satu pelayanan kesehatan dasar, sehingga Kementerian Kesehatan menetapkan KB sebagai salah satu program kesehatan wajib yang harus didukung. Sehingga Kementerian kesehatan mengembangkan sebuah model sistem informasi KB Kesehatan yang telah disosialisasikan sejak tahun 2007.

Oleh karena itu, penelitian ini mempunyai tujuan untuk mengimplementasikan sistem informasi yang dapat digunakan untuk melakukan pengolahan data obat dan alat kontrasepsi. Sistem informasi ini dapat membantu untuk mendapatkan informasi yang cepat dan akurat.

METODE

A. ANALISA KEBUTUHAN

Analisa Kebutuhan Fungsional

Analisa kebutuhan fungsional untuk aplikasi Sistem Informasi Keluarga Berencana di BPMP dan KB Kabupaten Sumenep yaitu:

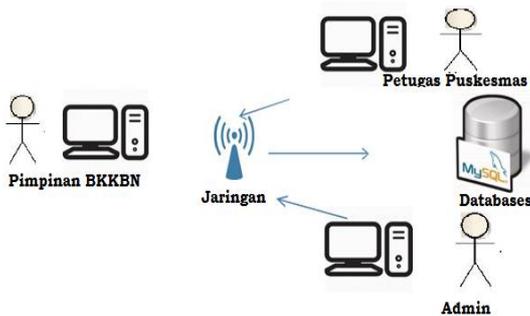
1. Fungsi Login.
2. Fungsi Pengelolaan Data Peserta Keluarga Berencana.
3. Fungsi Pengelolaan Data Kader Atau Penyuluh Keluarga Berencana.
4. Fungsi Pencarian data pada setiap pengolahan data.

Analisa Kebutuhan Kinerja

Aplikasi Sistem Informasi Inventaris alat dan obat kontrasepsi pada instansi Keluarga Berencana BPMP & KB Kabupaten Sumenep dapat dioperasikan oleh tiga pengguna. Pengguna harus melakukan login terlebih dahulu sesuai dengan hak aksesnya. Pengguna terdiri dari staff pada Bidang Keluarga Berencana, Kepala Bidang Keluarga Berencana, dan Admin Puskesmas yang dapat diakses oleh puskesmas untuk menginputkan atau memasukkan data peserta dan data pelayanan Keluarga Berencana. Aplikasi ini hanya digunakan oleh Bidang Keluarga Berencana jadi aplikasi sistem informasi ini terhubung oleh satu jaringan yang sama yaitu jaringan LAN pada Bidang Keluarga Berencana.

B. ARSITEKTUR SISTEM

Arsitektur Sistem Informasi inventaris obat dan alat kontrasepsi pada Keluarga Berencana Instansi Badan Pemberdayaan, Perempuan dan Keluarga Berencana dapat dilihat pada Gambar 1.



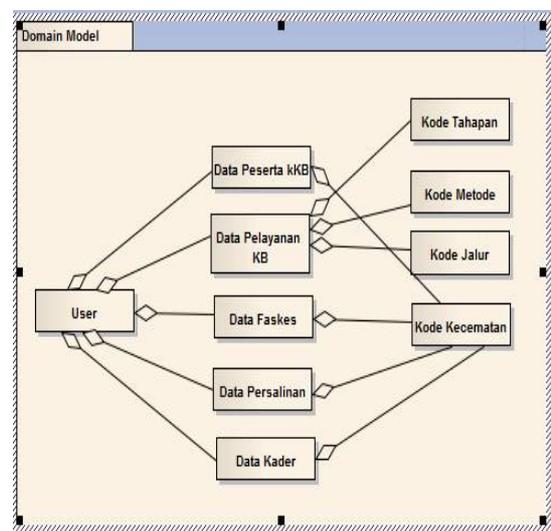
Gambar 1. Arsitektur Sistem

Berdasarkan Gambar 1 Sistem Informasi inventaris obat dan alat kontrasepsi Keluarga Berencana merupakan sistem informasi berbasis web yang dapat diakses oleh beberapa pengguna. Pengguna tersebut terdiri dari: Admin, pegawai atau staff Bidang

Keluarga Berencana, dan Kepala Bidang Keluarga Berencana sebagai client yang dapat melakukan pengelolaan data Keluarga Berencana. Sistem informasi ini terhubung pada jaringan LAN (Local Area Network) yang hanya diperuntukan di Bidang Keluarga Berencana.

C. DOMAIN MODEL

Domain model Sistem Informasi inventaris obat dan alat kontrasepsi ditunjukkan pada Gambar 2 .



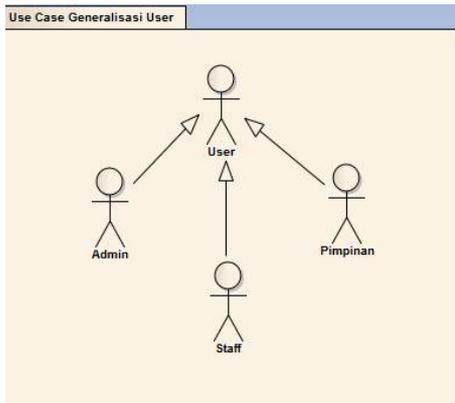
Gambar 2 Domain model Aplikasi Sistem Informasi Keluarga Berencana

Berdasarkan Gambar 2 pengguna memiliki kelas antara lain: data peserta KB, data kader atau penyuluh keluarga berencana, data persalinan, data faskes (fasilitas kesehatan keluarga berencana), data pelayanan KB (Keluarga Berencana), data kecamatan, data desa, data alat atau obat kontrasepsi yang disediakan oleh BKKBN Kabupaten Sumenep. Dalam sistem informasi ini juga memuat jumlah alat dan obat kontrasepsi yang disediakan dan yang akan dibagikan ke setiap Faskes (Fasilitas Kesehatan) yang bekerja sama dengan BKKBN dan pemerintah.

D. USE CASE

Use Case Generalisasi User

Use case generalisasi user ditunjukkan pada Gambar 3.

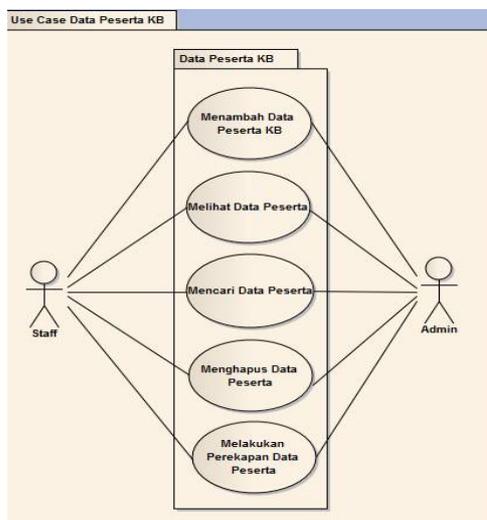


Gambar 3. Use case Generalisasi user

Berdasarkan Gambar 3 dapat disimpulkan generalisasi *User* terdiri dari: pengguna admin, staff dan kepala atau pimpinan BKKBN. Setiap pengguna mempunyai hak akses dan menjalankan tugasnya masing-masing. Sebagai contoh pengguna Admin dapat mempunyai tugas untuk melakukan pendataan faskes, data puskesmas, data kecamatan, data desa, data pelayanan, data jumlah alat yang akan dibagi kepada setiap faskes yang berada di setiap kecamatan.

Use Case Pendaftaran Peserta KB Baru

Use Case pendaftaran peserta keluarga berencana dapat dilihat pada Gambar 4.



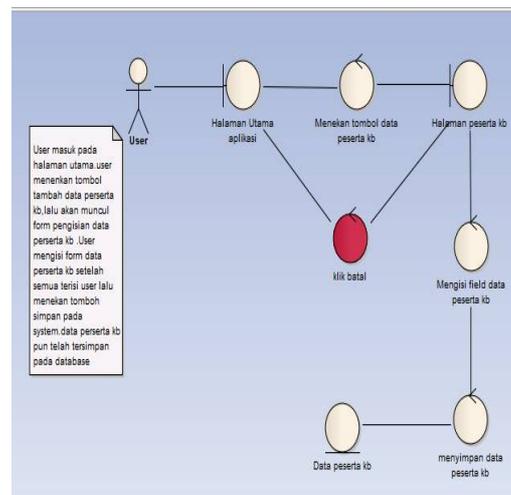
Gambar 4. Use Case Pendaftaran Peserta KB Baru

Berdasarkan Gambar 4 pada halaman pendaftaran peserta KB baru dapat melakukan beberapa hal sebagai berikut: menambah data peserta, melihat data peserta, mencari data peserta, menghapus data peserta serta dapat merekap data peserta. Selain dapat menambah data peserta KB baru, *User* dapat melakukan pengeditan data peserta yang mengalami kesalahan saat melakukan penginputan atau penambahan data peserta KB baru

E. ROBUSTNESS DIAGRAM

Robustness Diagram Menambah Data Peserta KB

Robustness diagram untuk menambah data peserta KB ditunjukkan pada Gambar 5.



Gambar 5. Robustnes Diagram Menambah Data Peserta KB

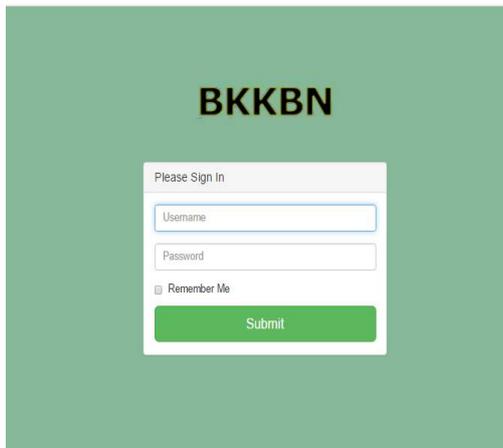
Berdasarkan Gambar 5 dapat dilihat bahwa pengguna mengakses halaman utama sistem. Pengguna menekan tombol tambah data peserta KB, lalu akan muncul halaman tambah data peserta KB. Pengguna mengisi data peserta KB, kemudian menekan tombol simpan. Setelah itu, data peserta KB disimpan didalam tabel data peserta KB. Jika pengguna ingin membatalkan

pengisian data peserta KB, pengguna menekan tombol batal untuk kembali ke halaman utama sistem.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. HALAMAN LOGIN

Halaman Login merupakan halaman yang digunakan pengguna mengakses sistem. Halaman login dapat dilihat pada Gambar Sistem Informasi Keluarga Berencana ditunjukkan pada Gambar 6.

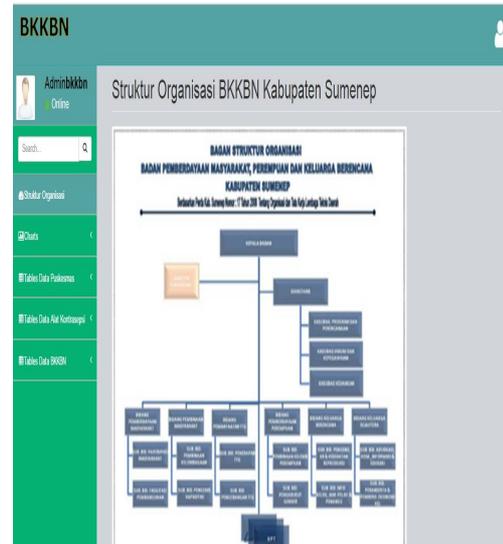


Gambar 6. Halaman Login

Berdasarkan Gambar 6 dapat dilihat bahwa halaman login memiliki *field Username* dan *password* yang digunakan untuk login atau mengakses Sistem Informasi.

B. HALAMAN UTAMA SISTEM

Halaman utama sistem ditunjukkan pada Gambar 7.



Gambar 7. Halaman Utama Sistem
Berdasarkan Gambar 7 pada halaman utama sistem Informasi memuat semua data yang berhubungan dengan hak akses pengguna. Tiap pengguna berbeda isi dari halaman utama yang dapat diakses.

C. HALAMAN DATA PESERTA KB

Halaman data peserta KB dapat dilihat pada Gambar 8.

Gambar 8. Halaman Data Peserta KB

Berdasarkan Gambar 8 dapat dilihat bahwa pengguna dapat melakukan penambahan data peserta KB. Pada halaman ini juga pengguna dapat

menambah, mengubah dan menghaspusta data.

Sistem informasi dapat menghasilkan laporan data peserta KB sesuai dengan Faskes yang diikuti. Selain itu, sistem juga dapat menghasilkan laporan pelayanan KB berdasarkan Faskesnya.

SIMPULAN

Berdasarkan metodologi dan hasil pembahasan dapat disimpulkan bahwa :

1. Sistem informasi dapat membantu melakukan pendataan jumlah obat dan alat kontrasepsi di BKKBN
2. Sistem informasi dapat membantu dalam manajemen data alat dan obat di BKKBN.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Bahagia, S. N, Sistem Inventori., Penerbit ITB., Bandung, 2006.
- [2] Waters, D., Inventory Control and Management (2nd Edition ed.), Wiley India Pvt. Limited, England, 2003
- [3] Yunarto, H. I., & Santika, M. G. Business Concept Implementation Series in Inventory Management, : PT Elex Media Komputindo, Jakarta, 2005.
- [4] Assauri, S. Manajemen Produksi dan Operasi, Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta, 2008.
- [5] Zulfiandri & Dyah Citra Wardhani, “Rancang Bangun Sistem Informasi Manajemen Aset Berbasis *Private Cloud* (Studi Kasus : TVRI Nasional)”, Jurnal Simantec, Vol 5, no 1, pp 49-58, 2015.
- [6] SearchSOA.com, 2014.
- [7] MariaDB Foundation, 2014.
- [8] Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 409a/KMK.04/1990,
- [9] Surat Keputusan Dirjen Migas 3675.K/24/DJM/2006 tanggal 17 Maret 2006:
- [10] Keputusan Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Nomor 14496 K/14/DJM/2008 tanggal 21 Agustus 2008: